

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Konsep Otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam penelitian konsp otorita tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, untuk membahas dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang undangan-undangan, konseptual. Metode analisis data yang digunakan yakni deskriptif dan kualitatif.

Di dalam penenlitian ini membahas tentang konsep otorita yang di terapkan di Ibu Kota Nusantara yang mana melandaskan atas dasar yang sudah tertera di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang ini sebagai payung Hukum dalam penerapan Konsep Otorita. Didalam penenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Konsep Otorita yang di terapkan di Ibu Kota Nusanatara, bertentengan dengan UUD NRI Tahun 1945 dimana dalam Konsep OtoritA yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara tidak ada yang lembaga legislatif yakni DPRD yang berfungsi sebagai lembaga pengawas, sedangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengamatkan bahwa setiap daerah baik Provinsi atau Kapaten dan Kota perlu terdapat DPRD, maka dari Konsep Otorita tersebut bententengan dengan Konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945. Dari hasil penelitian tersebut maka memunculkan beberapa rekomendasi a. Perlu adanya judicial review Undang-Undang Ibu Kota Nusantara b. Perlu terdapat DPRD sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci : Konsep Otorita, DPRD, Ibu Kota Nusantara, Konstitusi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of authority in Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital from the perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Where in research the constituency of the Republic of Indonesia is not in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, to discuss the research using the method normative research, with a statutory, conceptual approach. The data analysis method used is descriptive and qualitative.

This research discusses the concept of authority that is applied in the Capital of the Archipelago which is based on the basis stated in Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital, this Law as a legal umbrella in the application of the Concept of Authority. In this research using normative research methods using primary data. The results of this study explain that the concept of Authority which is applied in the capital city of Nusantara is in conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia where in the Concept of Authority which is applied in the Capital of the Archipelago there is no legislative institution, namely the DPRD which functions as a supervisory agency, while in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Constitution of the State of Indonesia stipulates that every region, be it a province or a district and a city, needs to have a DPRD, so from the concept of authority, it is fortified with the Indonesian Constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. There is a need for a judicial review of the Law on the Capital of the Archipelago b. There needs to be a DPRD in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keyword : *The concept of authority, DPRD, the capital of the Nusantara, Constitutions.*